THE INTERNATIONALIZATION OF WEST PAPUAâ€™S STRUGGLE: UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA
(ULMWP) DIPLOMATIC ADVOCACY FOR SELF-DETERMINATION IN SOUTH PACIFIC SUB-REGIONAL FORUMS
Allisya Shalimar Putri, Dr. Rochdi Mohan Nazala, S.I.P., M.A. M.Lit
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The long-standing pursuit of West Papua's self-determination has evolved into a complex transnational movement that developed further outside or even beyond the confinement of Indonesia's domestic politics. This study particularly tailored itself to explicitly scrutinize the intricate process of internationalization of the West Papuan struggle through the diplomatic advocacy of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), with putting heavy emphasis upon its engagements in the South Pacific sub-regional setting— specifically, institutions such as the Melanesian Spearhead Group (MSG) and the Pacific Islands Forum (PIF)—from 2014 to 2024. Anchored within a constructivist framework, and employing Keck and Sikkink's "boomerang effect" as a theoretical lens, this study elucidated how the ULMWP formulate a normative legitimacy by framing the West Papua's independence discourse around human rights violations and painting it as the failure/incomplete decolonization project. Through thorough process tracing encapsulated in a qualitative approach, the study reveals an absence of tangible political recognition or full membership in regional organizations for West Papua, and yet, ULMWP's diplomatic and digital strategies have in some certain ways been considered as a successful step in transposing the independence struggle of West Papua from a localized grievance towards a sustained international concern. Although, it is apparent that Indonesia's counter-diplomacy and the asymmetrical power dynamics within the South pacific, had considerably restrain these achievements, limiting tangible policy outcomes. Accordingly, this study manages to underscore how non-state actors employ transnational advocacy, norm diffusion, and digital diplomacy to challenge prevailing notions of sovereignty, while also simultaneously bringing insights on understanding self-determination within contemporary regional politics.

THE INTERNATIONALIZATION OF WEST PAPUAâ€™S STRUGGLE: UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA
(ULMWP) DIPLOMATIC ADVOCACY FOR SELF-DETERMINATION IN SOUTH PACIFIC SUB-REGIONAL FORUMS
Allisya Shalimar Putri, Dr. Rochdi Mohan Nazala, S.I.P., M.A. M.Lit
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRAK

Perjuangan panjang West Papua untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri telah berkembang menjadi sebuah gerakan transnasional yang kompleks, yang kini tumbuh di luar, bahkan melampaui batas politik domestik Indonesia. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menelaah secara eksplisit proses internasionalisasi perjuangan West Papua melalui advokasi diplomatik yang dilakukan oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), dengan penekanan kuat pada keterlibatannya di kawasan subregional Pasifik Selatan—khususnya pada lembaga-lembaga seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Forum* (PIF)—dalam rentang waktu 2014 hingga 2024.

Berlandaskan kerangka berpikir konstruktivis serta menggunakan konsep *boomerang effect* dari Keck dan Sikkink sebagai lensa teoretis, penelitian ini menjelaskan bagaimana ULMWP membangun legitimasi normatif dengan membingkai wacana kemerdekaan West Papua melalui isu pelanggaran hak asasi manusia dan menggambarkannya sebagai proyek dekolonisasi yang gagal atau belum tuntas. Melalui *process tracing* yang mendalam dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap tidak adanya pengakuan politik yang konkret maupun keanggotaan penuh bagi West Papua dalam organisasi-organisasi regional. Namun demikian, strategi diplomasi dan digital yang dilakukan oleh ULMWP dalam beberapa hal dapat dianggap sebagai langkah berhasil dalam mentransformasikan perjuangan kemerdekaan West Papua dari keluhan yang bersifat lokal menjadi isu internasional yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, jelas bahwa kontra-diplomasi Indonesia serta dinamika kekuasaan yang asimetris di kawasan Pasifik Selatan secara signifikan membatasi capaian tersebut dan menghambat lahirnya kebijakan yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bagaimana aktor non-negara memanfaatkan advokasi transnasional, difusi norma, dan diplomasi digital untuk menantang konsep kedaulatan yang berlaku, sekaligus memberikan wawasan baru dalam memahami makna penentuan nasib sendiri dalam politik regional kontemporer.